

## ABSTRAK

Pada Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan DIY dinyatakan resmi berlaku. Berdasarkan Undang-undang yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut Pemerintah Pusat memberikan lima kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima kewenangan tersebut terdiri dari: Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata ruang. Masyarakat berharap keistimewaan bisa menjadi solusi atas persoalan berkepanjangan terkait hubungan antara pusat dan daerah di DIY, dan menjadi instrument dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang terjadi bukan semakin kokohnya arsitektur bangunan politik keistimewaan DIY melainkan munculnya dinamika politik keistimewaan yang sarat dengan seteru dan polemik. Penelitian ini hendak mengeksplorasi bagaimana berlangsungnya dinamika politik keistimewaan DIY sesudah diberlakukannya UU No 13 tahun 2012 serta apa saja faktor-faktor yang mendasari terjadinya dinamika politik keistimewaan tersebut.

Ada dua teori yang dipergunakan dalam studi mengenai "Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta" ini, yakni teori desentralisasi yang memfokuskan pada devolusi dan teori dispositif Foucaultian. Teori desentralisasi dipergunakan untuk memotret dan membongkai kajian terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan kewenangan istimewa dari pemerintah pusat. Sementara teori dispositif dipergunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal ikhwal yang terkait dengan fenomena dinamika politik yang muncul dan berkembang di DIY. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori dalam analisis dispositif yang meliputi: area referensi, otoritas regulasi, prosedur regulasi dan strategi imperatif.

Penelitian ini menemukan bahwa Analisis dispositif yang dipergunakan sebagai pisau analisis telah berkontribusi dalam mengkonstruksi dan memetakan dinamika politik yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Analisis atas area referensi, otoritas regulasi, prosedur regulasi dan strategi imperatif menunjukkan bahwa pada dasarnya substansi keistimewaan DIY terletak pada mekanisme pengangkatan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur. Adapun empat urusan keistimewaan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keistimewaan seperti kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan hanyalah faktor-faktor dalam strategi imperatif yang berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan seluas-luasnya dan selama-lamanya.

Dengan kata lain, Undang-undang Keistimewaan secara terang benderang telah menjadi prototif dari sebuah instrumen legal dalam pemberian kekuasaan oleh negara pada Sultan dan Paku Alam secara afirmasi negatif. Undang-undang Keistimewaan DIY menjadi dasar dan sekaligus payung hukum atas kedudukan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Kedudukan tersebut ditopang oleh kekuatan ekonomi dalam bentuk urusan keistimewaan dalam bidang pertanahan dan tata ruang, kekuatan sosial dan simbol budaya melalui kewenangan istimewa dalam kebudayaan, dan pelebagaan birokrasi patrimonial melalui kewenangan istimewa kelembagaan. Hal ini menempatkan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai eksekutif pada posisi yang dominan atas legislatif yang berdampak pada tidak dapat berjalannya mekanisme *check and balance* dalam proses penyelenggaraan roda pemerintahan di DIY.

Keywords: desentralisasi, dinamika politik, relasi wacana-kuasa

## ABSTRACT

Since 2012, the law of special regent of Yogyakarta privileges was officially implemented. Based on The law that consisting 16 chapters and 51 verses, the central government of Indonesia distributes five authorities embodied in special regent government of Yogyakarta. Those five authorities are: pattern or mechanism in fulfilling the chair of Governor and its vice governor, special model of local government institutions, culture, land and spacial regulation. The people of Yogyakarta hope that the privileges become the solution for the long problem of the relation between central and local government. Hopefully, this act able to being instrument to achieve the welfare society. In fact, this law does not strengthening the political architecture of the privileges policy, but it emerges the hot political dynamic with conflict and polemic. This study aimed to exploring how the dynamic of privileges politic after the implementation of Act No 13. 2012, and the factors which influenced the dynamics.

Two theories were used in this study, first, decentralization theory, mainly on devolution, and second, foucaltian dispositive theory. Decentralization theory is used to analysis decentralization policy from central government to Yogyakarta. While the dispositive theory is for analyzing and describing problems and phenomena occur in special province of Yogyakarta. Furthermore, the discussion is presented by referring to the theoretical framework and dispositive analyses include: area of reference, authority of regulation, process of regulation, and imperative strategies.

This research found that dispositive analysis helped in constructing and mapping the political dynamic in related to special province of Yogyakarta having law 13/2012 enacted. The analysis on area of reference, authority of regulation, process of regulation, and imperative strategies indicated that basically the substance of DIY privileges is on procedure in fulfilling governor and vice governor. Therefore, those of other special affairs: special model of local government institutions, culture, land and spacial regulation are only influenced factors or instruments to get and perpetuate the power.

In another word, the privileges law frankly becomes prototype of legal instrument for the state to gave power to Sultan and Paku

Alam with negatively affirmative. The privileges act of become a foundation and also a legal standing for Sultan Hamengkubuwono to being governor and Paku Alam is a vice governor. This legal standing is also supported by economic capital (the rule of land and spacial regulation), social and political capital, and cultural hegemony through formatting patrimonial bureaucracy. Consequently, Governor and viceGovernor can be more dominant then the parliament. Parliament have no enough power to do check and balance mechanism in controlling process of government policy.

Keywords: decentralization, political dynamic, discourse interplay, power relation